

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: STUDI KOMPARATIF TIGA PERIODE KEPEMIMPINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Rahayu¹⁾, Salman Jumaili¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

ABSTRACT

This study aims to analyze the Central Government Financial Statement (LKPP) by comparing the three periods of leadership of the President of the Republic of Indonesia, beginning with the last 3 (three) periods, namely the period 2004-2009, 2009-2014, and 2014-present. Comparison is done to provide the condition of Indonesia viewed from the financial statements. LKPP will be analyzed using financial ratio analysis, analysis of increase and decrease of assets, liabilities and equity accounts, and The analysis of financial ratios used is the ratio of liquidity, solvency, income effectiveness, spending efficiency, revenue growth and shopping growth. Comparison is also made to BPK Opinion results. The results obtained from this study is that the highest level of liquidity ratios occurred in 2008, the lowest solvability ratio of equities occurred in 2006, the lowest solvency ratio of assets occurred in 2012, the highest income effectiveness ratio occurred in 2008, the ratio the lowest expenditure efficiency occurred in 2016, the highest revenue growth rate occurred in 2008, and the lowest level of spending growth occurred in 2008. The highest asset and liability value was in 2016. The highest equity value was in 2015. The highest SiLPA was obtained in the year 2008. For the BPK audit opinion, in 2016, LKPP first obtained Unqualified Opinion.

Keywords : The Central Government Financial Statement (LKPP), President

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan membandingkan tiga periode kepemimpinan presiden Republik Indonesia, yang dimulai dengan 3 (tiga) periode terakhir, yaitu periode tahun 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-sekarang. Perbandingan dilakukan untuk memberikan kondisi Indonesia dilihat dari laporan keuangan. LKPP akan dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan, analisis kenaikan dan penurunan akun aset, kewajiban, dan ekuitas, serta . Analisis rasio keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja. Perbandingan juga dilakukan terhadap hasil Opini BPK. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tingkat rasio likuiditas yang tertinggi terjadi pada tahun 2008, rasio solvabilitas atas ekuitas yang terendah terjadi pada tahun 2006, rasio solvabilitas atas asset yang terendah terjadi pada tahun 2012, rasio efektifitas pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008, rasio efisiensi belanja terendah terjadi pada tahun 2016, tingkat pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008, dan tingkat pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2008. Nilai aset dan kewajiban tertinggi berada pada tahun 2016. Nilai ekuitas tertinggi berada pada tahun 2015. SiLPA tertinggi diperoleh pada tahun 2008. Untuk opini audit BPK, pada tahun 2016, LKPP pertama kalinya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kata kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Presiden.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur pemerintah terdiri dari Pemerintah pusat maupun daerah. Institusi tersebut merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, pemerintah memerlukan dana yang dapat dipungut dari masyarakat dengan berbagai macam jenis pendapatan masyarakat, kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, membentuk departemen atau dinas yang melaksanakan program dan kegiatan. Kinerja keuangan departemen atau dinas antara lain dapat diukur dengan metode analisis rasio keuangan yang bisa didapatkan melalui data sebuah laporan keuangan. Rasio keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio pertumbuhan, jumlah sumber daya yang digunakan atau pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional (Mahsun, 2006). Artinya, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pendekatan analisis anggaran, analisis laporan keuangan, metode *balance scorecard* dan *performance audit* (Mahsun, 2006).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun Laporan Keuangan sejak tahun 2004. Opini yang diterima untuk tahun tersebut adalah opini audit *disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat) dan baru menerima opini *Unqualified Opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2016.

Pencatatan akuntansi sebelum tahun 2004 mengalami banyak perubahan. Awal pencatatan dimulai dengan menggunakan sistem pencatatan *single entry*, yang kemudian beralih menjadi *double entry*. Bentuk pertanggungjawaban yang dengan menggunakan Laporan Keuangan di mulai sejak tahun 2004 hingga sekarang. Pada tahun 2004, basis pencatatan masih bersifat *cash toward accrual*. Terjadi

perubahan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yang berubah menjadi *accrual*.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat sangat penting. Jangan sampai anggaran lebih banyak dipakai untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik. Peningkatan pemberian opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari opini audit *disclaimer* ke *qualified* membawa gambaran pada membaiknya kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh.

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2007). Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*).

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah pusat dalam mengelola keuangan negara. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya.

Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan.

Kepemimpinan menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Berbagai pendapat dan hasil penilaian ekonomi dijadikan indikator keberhasilan pemimpin, yaitu dalam hal ini kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Analisis untuk menilai keberhasilan tersebut dapat dipertajam dengan mengaitkan antara kondisi di lapangan dengan kondisi keuangan negara. Penelitian ini mencoba melakukan studi komparatif untuk 3 (tiga) masa kepemimpinan terakhir presiden Republik Indonesia. Perbandingan dilakukan bukan untuk mencari kekurangan ataupun kelebihan presiden dari sosok pribadi, tetapi lebih menekankan kepada kondisi negara dan masyarakat, serta perekonomian pada masing-masing periode tersebut. periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Periode Kepemimpinan
Presiden Republik Indonesia

NO.	NAMA PRESIDEN	PERIODE
1	JOKO WIDODO (JOKOWI)	20 OKTOBER 2014-SEKARANG
2	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY-2)	20 OKTOBER 2009-20 OKTOBER 2014
2	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY-1)	20 OKTOBER 2004-20 OKTOBER 2009

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah pusat pada 3 (tiga) periode kepemimpinan presiden RI dengan judul “Analsis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP): Studi Komparatif 3 (tiga) Periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia”. Penelitian ini membatasi dari salah satu sudut pandang paling mendasar yaitu pengukuran kinerja dari prespektif *financial* yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2004 sampai tahun 2016.

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kasmir (2008) mendefinisikan “laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Halim (2002) menjelaskan bahwa “laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu”.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan (Mahsun, 2006). Mahmudi (2007) mendefinisikan “laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam memuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas”.

Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik dapat dilihat dari laporan keuangan (Mahsun, 2006). Artinya informasi tentang posisi keuangan publik dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

2.1.2. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: (1) Saldo Anggaran Lebih awal; (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan (5) Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Neraca;
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
- d. Laporan Operasional;
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- e. Laporan Arus Kas;
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut di atas disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

2.1.3. Rasio-rasio yang Dipergunakan dalam Analisis Laporan Keuangan

Rasio merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya (Kasmir 2008). Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat antara lain:

- a. Rasio likuiditas
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun pemerintah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas (Mahmudi, 2007). Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya.
- b. Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kasmir (2008) mendefinisikan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya.
- c. Rasio efektivitas pendapatan negara
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan negara selain pendapatan hibah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kemampuan pemerintah dalam menjalankan

tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar 100 persen (Halim, 2002). Rasio efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu kegiatan operasi atau program pemerintah. Suatu kegiatan dinilai efektif apabila kegiatan atau program tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio *efektivitas* memberi gambaran tentang kontribusi pendapatan negara (pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak) selain hibah terhadap jumlah total pendapatan pemerintah pusat (Mahmudi, 2007).

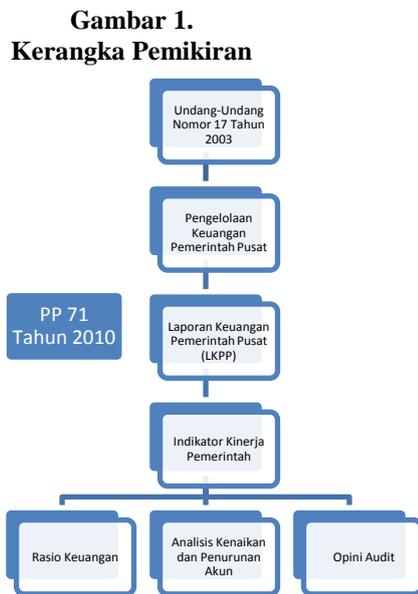
- d. Rasio efisiensi belanja
Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolut, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2007). Tingkat efisiensi kegiatan pemerintah pusat dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah pusat dengan menunjukkan apakah pemerintah pusat telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Jika tingkat efisiensi rendah, berarti belanja negara semakin kecil sehingga kinerja pemerintah pusat semakin membaik. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah untuk menekan belanja negara dan meningkatkan pendapatan negara.
- e. Analisis pertumbuhan pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2007). Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya, jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan.
- f. Analisis pertumbuhan belanja
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik. Alasannya, kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang, dan penyesuaian faktor makro ekonomi (Mahmudi, 2007).

2.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah: Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, amka bentuk pengelolaan keuangan pemerintah pusat dipertanggungjawabkan salah satunya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyusunan Laporan Keuangan disusun berdasarkan pada PP 24 tahun 2005 yang diganti dengan PP 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, dan ditambah dengan melakukan analisis atas kenaikan dan penurunan akun, serta opini auditor oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kerangka pemikiran penelitian ini terlihat pada gambar di bawah ini:



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan langsung dengan cara mendownload LKPP. Pada saat penelitian ini dilakukan data audited tahun 2016 belum didapat, dikarenakan LKPP audited belum dikeluarkan.

3.3. Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengolah data LKPP. Data LKPP diolah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, (Mahmudi, 2007) diantaranya yaitu:

1. Rasio Likuiditas
Dihitung dengan cara:
$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$
2. Rasio Solvabilitas (debt to equity)
Dihitung dengan cara:
$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$
3. Rasio Solvabilitas (debt to assets)
Dihitung dengan cara:
$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$
4. Rasio Efektivitas Pendapatan
Dihitung dengan cara:

5. Rasio Efisiensi Belanja
Dihitung dengan cara:
$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}}$$
6. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
$$\frac{\text{Realisasi Pend thn } t - (\text{thn } t-1)}{\text{Realisasi Pend thn } t-1}$$
7. Tingkat Pertumbuhan Belanja
$$\frac{\text{Realisasi Belanja thn } t - (\text{thn } t-1)}{\text{Realisasi Belanja thn } t-1}$$

3.4. Alat Analisis Data

Analisis akan dilakukan dengan cara:

1. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari LKPP audited sejak tahun 2004-2016.
2. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan.
3. Data akan dianalisis dengan menggunakan trend kenaikan dan penurunan atas akun-akun tertentu.
4. Analisis akan dilakukan terhadap tiga periode kepemimpinan presiden RI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan pada LKPP 2004-2016, telah dilakukan analisis rasio keuangan dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Rasio Keuangan LKPP Tahun 2004-2016

No.	Tahun	Rasio keuangan						
		Rasio likuiditas	Rasio solvabilitas-debt to equity	Rasio solvabilitas-debt to assets	Rasio efektivitas pendapatan	Rasio efisiensi belanja	Rasio Pertmbhn Pendptn	Rasio Pertmbhn Belanja
1	2016	78,62%	248,25%	71,29%	87,11%	89,50%	3,18%	3,20%
2	2015	69,64%	209,22%	67,66%	85,60%	91,04%	-2,74%	1,64%
3	2014	74,64%	286,25%	74,11%	94,81%	94,69%	7,76%	7,69%
4	2013	68,66%	289,69%	74,34%	95,80%	95,61%	7,53%	10,68%
5	2012	90,67%	169,02%	62,83%	98,52%	96,31%	10,53%	15,15%
6	2011	108,26%	180,97%	64,41%	103,48%	98,05%	21,64%	24,27%
7	2010	126,54%	286,18%	74,11%	100,29%	92,54%	17,26%	11,17%
8	2009	123,18%	381,18%	79,22%	97,45%	93,66%	-13,53%	-4,91%
9	2008	145,62%	448,05%	81,75%	109,68%	99,63%	38,68%	30,11%
10	2007	112,07%	845,49%	89,42%	101,98%	100,70%	10,94%	13,57%
11	2006	116,50%	-1208,07%	109,02%	96,79%	95,43%	28,83%	30,90%
12	2005	93,13%	-794,51%	114,40%	91,68%	90,19%	22,77%	19,30%
13	2004	69,05%	-271,35%	158,36%	99,90%	99,33%	#DIV/0!	#DIV/0!

Berdasarkan pada tabel 2. di atas, analisis atas rasio keuangan, yaitu:

1. Rasio likuiditas
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun pemerintah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas (Mahmudi, 2007). Analisis likuiditas

dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar.

Rasio likuiditas tertinggi terdapat pada tahun 2008 yaitu 145,62% dan terendah pada tahun 2013 yaitu 68,66%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan tertinggi pemerintah pusat untuk dapat membiayai kebutuhannya terjadi pada tahun 2008, dan terendah pada tahun 2013.

Rasio ini dilakukan dengan membandingkan antara akun aktiva lancar dan utang lancar. Jika dilihat secara terpisah, maka diperoleh data bahwa aktiva lancar tertinggi dimiliki oleh Pemerintah RI pada tahun 2015. Hal ini juga terjadi untuk akun utang lancar, yaitu tertinggi dimiliki pada tahun 2015. Data tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Jumlah Aktiva Lancar dan Utang Lancar
Tahun 204-2016

No.	Tahun	Aktiva lancar	Utang lancar
1	2016	304.611.773.163.182	387.444.848.777.136
2	2015	326.755.380.598.002	469.227.744.936.972
3	2014	262.980.618.272.981	352.308.954.175.480
4	2013	252.741.464.557.987	368.086.831.707.954
5	2012	241.315.134.207.260	266.136.388.831.668
6	2011	266.807.824.111.647	246.444.880.163.115
7	2010	254.779.627.714.260	201.343.960.842.088
8	2009	231.388.713.199.864	187.839.287.320.918
9	2008	264.069.841.008.506	181.343.265.322.490
10	2007	156.599.727.674.012	139.732.332.373.059
11	2006	125.985.156.709.628	108.140.970.556.881
12	2005	128.551.436.803.753	138.027.347.740.000
13	2004	86.895.890.197.385	125.838.076.233.260

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kasmir (2008) mendefinisikan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.

Rasio *solvabilitas-deb to equity* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas. **Nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar -1208,07% dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 845,49%.** Nilai pada tahun 2006 terjadi dikarenakan ekuitas bernilai negatif. Pada periode Jokowi, rasio ini berada dalam nilai berkisar 200an %.

Rasio *solvabilitas-deb to assets* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total assets. **Nilai rasio terendah terjadi pada tahun**

2012 sebesar 62,83% dan tertinggi pada tahun 2004 sebesar 158,36%.

3. Rasio efektivitas pendapatan negara

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan negara selain pendapatan hibah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar 100 persen (Halim, 2002). Rasio efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu kegiatan operasi atau program pemerintah. Suatu kegiatan dinilai efektif apabila kegiatan atau program tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio *efektivitas* memberi gambaran tentang kontribusi pendapatan negara (pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak) selain hibah terhadap jumlah total pendapatan pemerintah pusat (Mahmudi, 2007).

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target pendapatan. **Pendapatan yang paling efektif terjadi pada tahun 2008 sebesar 109,68%, dan pendapatan yang paling tidak efektif terjadi pada tahun 2015 sebesar 85,60%.**

4. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolut, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2007).

Tingkat efisiensi kegiatan pemerintah pusat dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah pusat dengan menunjukkan apakah pemerintah pusat telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Jika tingkat efisiensi rendah, berarti belanja negara semakin kecil sehingga kinerja pemerintah pusat semakin membaik. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah untuk menekan belanja negara dan meningkatkan pendapatan negara.

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya. **Anggaran biaya yang paling efisien terjadi pada tahun 2016 sebesar 89,50% dan anggaran biaya yang paling tidak efisien terjadi pada tahun 2007 sebesar 100,70%.**

5. Analisis pertumbuhan pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2007).

Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya, jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif maka menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan.

Pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 38,68% dan paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -13,53%.

6. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik. Alasannya, kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang, dan penyesuaian faktor makro ekonomi (Mahmudi, 2007).

Pertumbuhan belanja yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -4,19% dan paling tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 30,90%.

4.2. Trend kenaikan dan penurunan akun

Pada tahap analisis ini dilakukan analisis atas kenaikan dan penurunan akun-akun tertentu pada laporan keuangan. Kenaikan penurunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

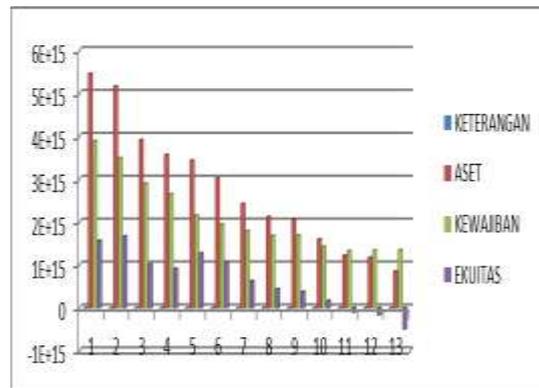
Tabel 4.
Jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Pusat Tahun 2004-2016

TAHUN	ASET	KEWAJIBAN	EKUITAS
2016	5.456.881.565.245.610	3.889.949.813.238.970	1.566.931.752.006.640
2015	5.163.321.643.105.700	3.493.530.747.415.070	1.669.790.895.690.630
2014	3.910.922.331.111.790	2.898.383.597.986.110	1.012.538.551.125.670
2013	3.567.585.745.586.740	2.652.099.779.815.930	915.485.965.770.801
2012	3.432.982.833.385.360	2.156.885.973.634.860	1.276.096.859.750.490
2011	3.023.447.176.100.690	1.947.373.299.152.990	1.076.073.876.947.690
2010	2.423.688.352.538.010	1.796.078.207.812.440	627.610.144.725.567
2009	2.122.897.478.369.310	1.681.708.394.583.360	441.189.083.785.950
2008	2.071.702.508.105.380	1.693.691.256.713.010	378.011.251.392.365
2007	1.600.211.672.865.020	1.430.965.464.059.550	169.246.208.805.469
2006	1.219.964.557.311.820	1.330.063.071.144.650	-110.098.513.832.838
2005	1.173.134.982.337.270	1.342.050.703.668.530	-168.915.721.331.257
2004	851.880.822.430.464	1.349.032.809.327.400	-497.151.986.896.941

Pada tabel 4. menunjukkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat sejak tahun 2004-2016. Terlihat bahwa setiap tahun aset dan kewajiban mengalami kenaikan, dan jumlah terbesar berada pada tahun 2016. Hal yang berbeda terjadi untuk akun ekuitas, kenaikan dan penurunan terjadi pada beberapa tahun untuk akun tersebut. nilai ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2015.

Data pada tabel 4. tergambar pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.
Kenaikan dan Penurunan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Pusat tahun 2004-2016



Keterangan tahun

1. 2016
2. 2015
3. 2014
4. 2013
5. 2012
6. 2011
7. 2010
8. 2009
9. 2008
10. 2007
11. 2006
12. 2005
13. 2004

4.3. Opini Audit atas LKPP

Berdasarkan pada data awal tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa terjadi perbaikan keuangan pada tahun 2016, hal ini juga terlihat dalam pemberian opini BPK, dimana LKPP untuk pertama kalinya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016. Berikut daftar pemberian opini BPK.

Tabel 5.
Opini Audit BPK Tahun 2004-2016

NO.	TAHUN	OPINI	KETERANGAN
1	2016	WTP	WAJAR TANPA PENGECUALIAN
2	2015	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
3	2014	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
4	2013	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
5	2012	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
6	2011	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
7	2010	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
8	2009	WDP	WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
9	2008	TMP	TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
10	2007	TMP	TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
11	2006	TMP	TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
12	2005	TMP	TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
13	2004	TMP	TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

4.4. SiLPA (SikPA) atas LKPP

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran/Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA) Pemerintah Pusat terlihat cukup stabil. **SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah sebesar Rp79.950.430.305.529,00 dan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu terdapat SiKPA sebesar Rp7.387.288.768.184,00.** Angka ini masih perlu untuk dianalisis lagi dengan melihat komponen

kenaikan atau penurunan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 6.
SiLPA (SiKPA) Pemerintah Pusat
Tahun 2004-2016

NO.	TAHUN	SiLPA (SiKPA)
1	2016	Rp26.162.398.789.393
2	2015	Rp24.685.095.188.710
3	2014	Rp22.103.390.346.916
4	2013	Rp25.862.316.415.059
5	2012	Rp22.064.486.727.762
6	2011	Rp46.501.872.158.526
7	2010	Rp44.689.530.774.402
8	2009	Rp23.948.894.793.758
9	2008	Rp79.950.430.305.529
10	2007	(Rp7.387.288.768.184)
11	2006	Rp273.913.693.682
12	2005	(Rp5.535.482.212.206)
13	2004	(Rp3.014.097.677.000)

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Rasio likuiditas tertinggi terdapat pada tahun 2008 yaitu 145,62% dan terendah pada tahun 2013 yaitu 68,66%.
2. Rasio Solvabilitas debt to equity terendah terjadi pada tahun tahun 2006 sebesar -1208,07% dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 845,49%.
3. Rasio Solvabilitas debt to assets terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 62,83% dan tertinggi pada tahun 2004 sebesar 158,36%.
4. Pendapatan yang paling efektif terjadi pada tahun 2008 sebesar 109,68%, dan pendapatan yang paling tidak efektif terjadi pada tahun 2015 sebesar 85,60%.
5. Anggaran biaya yang paling efisien terjadi pada tahun 2016 sebesar 89,50% dan anggaran biaya yang paling tidak efisien terjadi pada tahun 2007 sebesar 100,70%.
6. Pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 38,68% dan paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -13,53%.
7. Pertumbuhan belanja yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -4,19 dan paling tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 30,90%.

8. Nilai aset dan kewajiban tertinggi terjadi pada tahun 2016, dan nilai ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2015.
9. Opini WTP diperoleh pada tahun 2016.
10. SiLPA tertinggi diperoleh pada tahun 2008.

5.2. Saran

Penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar:

1. Melengkapi analisis dengan menggunakan laporan keuangan sebelum diaudit, untuk melihat besarnya koreksi yang dilakukan atas audit oleh BPK.
2. Melengkapi analisis dengan ikhtisar hasil temuan BPK.
3. Melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan rincian angka-angka dalam laporan keuangan, data perkembangan ekonomi, serta ketaatan atas peraturan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta
- Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta. STIE YKPN.
- Mahsun. M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Public. BPFE: Yogyakarta
- Mardiasmo, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.